

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Nomor : Un.05/III.8/PP.00.9/BS/054/2017

Tentang

JUDUL DAN PEMBIMBING PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Memperhatikan : Surat saudara **Putri Wulandari**, Nomor Pokok **1138010205**, tanggal 18/01/17 sebagaimana pada pokok surat.
- Menimbang : Bahwa Biro Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah menyetujui judul skripsi yang bersangkutan pada tanggal 20/01/17
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 07 Tahun 2013 Jo Peraturan Menteri Agama No. 77 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 147 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. B.li/3/06361 Tanggal 06 Juli 2015 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
 8. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung No. 151 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG TENTANG JUDUL DAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA.**

- Pertama : Mengesahkan Judul Skripsi:

**EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)
BERBASIS AKRUAL DI DINAS SOSIAL PROPINSI JAWA BARAT**

Atas Nama : **Putri Wulandari**
Nomor Pokok : **1138010205**
Jurusan : **Administrasi Publik**

- Kedua : Mengangkat Saudara:

1. **Drs. Mubarak, M.Si**
2. **Kadar Nurjaman, SE., MM.**

Sebagai Pembimbing Penulisan Skripsi tersebut

- Ketiga : Pembimbing bertugas melakukan bimbingan penulisan skripsi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- Keempat : Kepada Pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai mahasiswa yang bersangkutan lulus dalam ujian program Strata Satu (S-1);
- Keenam : Segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
2. Yth. Pembimbing Skripsi;
3. Arsip

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 23/01/17

Dekan,

Dr. Sahya Anggara, Drs., M.Si

NIP. 196705151994031006

 KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. AH Nasution No 105 Bandung Website: http://stipainsgd.ac.id Telp. 022-7811916	FORM (FR)	No. Dokumen : FISIP-IUAKM-FR-63	
		Tgl. Terbit : 1 September 2014	
		No. Revisi : 00	
		Hal : 1/1	

SURAT PERMOHONAN IZIN

Nomor : B-1494/Un.05/III.8/PP.009/10/2016
 Lamp : -
 Perihal : Permohonan Izin Survey Lapangan
 untuk Pra Penelitian Skripsi dan Permintaan Data

Bandung, 06 Oktober 2016

Kepada Yth :
 Bapak/Ibu
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Prov. Jabar
 di
 Jl. Supratman N0.44 Bandung.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan ini memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan data yang diperlukan kepada :

Nama : Putri Wulandari
 NIM : 1138010205
 Jurusan/Program : Administrasi Publik/Strata Satu (S1)
 Semester /Th. Akademik : VII (tujuh) 2016-2017.

Bahwa yang bersangkutan akan mengadakan Pra Penelitian di Dinas Sosial Prov.Jawa Barat, dalam rangka pengajuan judul seminar Proposal Skripsi.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
 Dekan Bidang Akademik



Dr. H. Encup Supriatna, Drs., M.Si
 NIP. 196304251990031001

Tembusan Yth :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN SGD Bandung (sebagai laporan).



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Supratman No. 44 Telp. (022) 7206174 - 7205759
Faksimil : (022) 7106286 website : www.bakesbangpol.jabarprov.go.id
e-mail : bakesbangpolinmasda@jabarprov.go.id
B A N D U N G Kode Pos 40121

SURAT KETERANGAN
070/863/X/Rekomlit/KESBAK/2016

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat dari : Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Nomor : B-1494/Un.05/III.8/PP.009/10/2016
Tanggal : 6 Oktober 2016

Menerangkan bahwa :

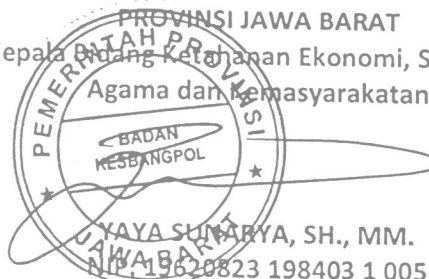
a.	N a m a	:	PUTRI WULANDARI
b.	Tlp/Email	:	<u>08992602401/putriwulndrpw@gmail.com</u>
c.	Tempat/Tgl. Lahir	:	Depok, 1 Oktober 1995
d.	Agama	:	Islam
e.	Pekerjaan	:	Mahasiswa
f.	Alamat	:	Jl. AH Nasution No. 290, Cipadung, Cibiru
o.	Peserta	:	-
h.	Maksud	:	Penelitian dan Pengumpulan Data
i.	Keperluan	:	Penelitian dan Pengumpulan Data
j.	Lokasi	:	Provinsi Jawa Barat
k.	Lembaga/Instansi yang dituju	:	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/ fasilitas yang diperlukan.
3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, surat keterangan ini berlaku sampai dengan **31 Desember 2016**

Bandung, 11 Oktober 2016

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT

Plt. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya,
Agama dan Masyarakat



YAYA SUNARYA, SH., MM.

NIP. 19620823 198403 1 005

 KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. AH Nasution No.105 Bandung Website: www.uin-sgd.ac.id Telp. 022 7811916	FORM (FR)	No. Dokumen : FISIP-TU.AKM-FR-63	
		Tgl. Terbit : 1 September 2014	
		No. Revisi : 00	
		Hal : 1/1	

SURAT PERMOHONAN IZIN

Nomor : B-1491/Un.05/III.8/PP.009/10/2016

Bandung, 06 Oktober 2016

Lamp : -

Perihal : Permohonan Izin Survey Lapangan
untuk Pra Penelitian Skripsi dan Permintaan Data

Kepada Yth :

Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Di

Jl. Raya Cibabat No.331 Kota Cimahi

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan ini memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan data yang diperlukan kepada :

Nama : Putri Wulandari

NIM : 1138010205

Jurusan/Program : Administrasi Publik/Strata Satu (S1)

Semester /Th. Akademik : VII (tujuh) 2016-2017.

Bahwa yang bersangkutan akan mengadakan Pra Penelitian di Instansi tersebut di atas. dalam rangka pengajuan judul seminar Proposal Skripsi.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

a.n. Dekan
Fakultas Bidang Akademik

Um. H. Entap Supriatna, Drs., M.Si
NIP. 196304251990031001

Tembusan Yth :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN SGD Bandung (sebagai laporan).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN GUNUNG DJATI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. AH Nasution No 105 Bandung
Website: <http://fisisipuinsgd.ac.id> Telp / Fax (022) 7811918

STANDARD
OPERATING
PROCEDURE
(SOP)

No. 108
Tgl. Terbit : 1 September 2014
No. Revisi : 00
Hal : 1/1

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



NAMA : PUTRI WULANDARI
NIM : 1138010205
PEMBIMBING I : Drs. MUBAROK, M.Si
PEMBIMBING II : KADAR NURJAMAN, SE., MM.
TANGGAL SK SKRIPSI : 23 JANUARI 2017
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) BERBASIS AKRUAL DI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT
No. BLANKO : 458

NO	TANGGAL	PEMBIMBING	MATERI PEMBIMBING	TANDA TANGAN
1	05-04-2017	I	judul	P-00
	26-04-2017	II	Sig ← BRS BMT	liber
2	05-04-2017	I	Bab I	P-00
	26-04-2017	II	Bab I Kri 1 Teori	liber
3	17-05-2017	I	Bab II Teori	P-00
	26-04-2017	II	Bab II - SAP ← 4	liber
4	17-05-2017	I	Bab III	P-00
	26-04-2017	II	Bab III - Akte	liber
5	26-07-2017	I	Bab I ^{Novel}	
	15-06-2017	II	Bab II - Teori Bab	liber
6	02-08-2017	I	Bab IV - kesimpulan	P-00
	15-06-2017	II	Bab IV	liber
7	02-08-2017	I	Abstrak	P-00
	15-06-2017	II	Bab V	liber
8	02-08-2017	I	Acc	P-00
	15-06-2017	II	for	liber

DOC. LAB 2016

Bandung, 3 Agustus 2017

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(Drs. MUBAROK, M.Si)

(KADAR NURJAMAN, SE., MM.)

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
“EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL DI DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT”

Oleh : Putri Wulandari (Administrasi Publik – UIN SGD Bandung)

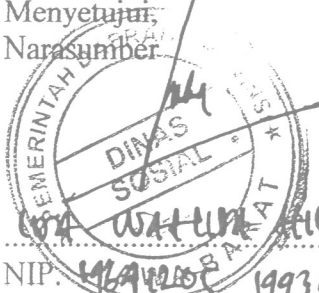
Narasumber	DR. HJ. IDA WATI HUDAATI, SE, SH, TESI
Jabatan	SEKRETARIS DINAS SOSIAL PROV. JAWA BARAT
Tempat	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Tanggal	11/7 - 17
Waktu	10 - 16 WIB

Daftar Pertanyaan :

1. Strategi apa saja yang bapak / ibu (pemimpin) lakukan dalam upaya penerapan SAP basis Akrua ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi strategi-strategi yang bapak/ibu ambil ?
3. Menurut pendapat bapak / ibu (pemimpin) apakah komitmen penerapan SAP basis Akrua merupakan suatu keinginan, kebutuhan, keharusan ?
4. Apa sikap yang bapak / ibu (pemimpin) ambil dalam menjaga komitmen tersebut?
5. Faktor pendorong dan penghambat apa yang mempengaruhi komitmen penerapan SAP basis akrua ?
6. Bagaimana pendapat bapak/ibu (pemimpin) mengenai kualitas pegawai yang berkaitan langsung dengan penerapan SAP basis Akrua khususnya pegawai subbag keuangan ?
7. Apakah kuantitas pegawai sudah mencukupi dalam penerapan SAP basis akrua?

Cimahi, 11 - 7 - 2017

Menyetujui,
Narasumber


 DR. WATI HUDAATI
 NIP. 199303 2 009

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
“EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL DI DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT”

Oleh : Putri Wulandari (Administrasi Publik – UIN SGD Bandung)

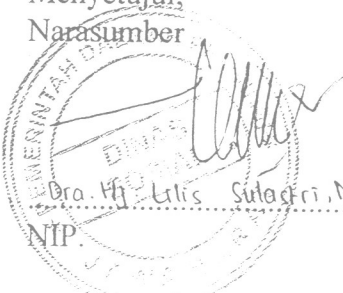
Narasumber	Dra. Hj. Lilis Sulastri, MM.
Jabatan	Kepala Sub bagian Kepegawayaan dan Umum
Tempat	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Tanggal	19 Juni / 2017
Waktu	07.43 - 08.05 WIB

Daftar Pertanyaan :

1. Menurut ibu apakah pegawai pada bagian keuangan sudah terdapat kesesuaian antara latar pendidikan dengan fokus kerja?
2. Apakah susunan umur mempengaruhi penerapan SAP basis akrual (dalam bidang SI)?
3. Apakah latar pendidikan pegawai mempengaruhi penerapan SAP basis Akrual?
4. Apakah tingkat pendidikan pegawai mempengaruhi penerapan SAP basis Akrual?
5. Apakah sarana dan prasarana (perangkat keras) yang ada sudah mencukupi dalam menerapkan SAP basis Akrual?
6. Apakah jaringan komunikasi (internet) sudah mencukupi dalam menerapkan SAP basis Akrual?
7. Apa saja pelatihan dan sosialisasi SAP basis Akrual sebelum penerapan dan apakah sudah mencukupi bagi para pegawai ?
8. Apakah setelah penerapan masih terdapat pelatihan dan sosialisasi ?
9. Pelatihan dan sosialisasi seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan para pegawai?

Cimahi, 19 Juni2017

Menyetujui,
Narasumber


 Dra. Hj. Lilis Sulastri, MM.
 NIP.

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
“EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL DI DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT”

Oleh : Putri Wulandari (Administrasi Publik – UIN SGD Bandung)

Narasumber	Dra. Hj. Haye Nurhayati, MM
Jabatan	Kepala Sub bagian Keuangan
Tempat	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Tanggal	10 Juli / 2017
Waktu	13.30 - 14.00 WIB

Daftar Pertanyaan :

1. Strategi apa saja yang bapak / ibu (pemimpin) lakukan dalam upaya penerapan SAP basis Akrua?l ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi strategi-strategi yang bapak/ibu ambil ?
3. Menurut pendapat bapak / ibu (pemimpin) apakah komitmen penerapan SAP basis Akrua?l merupakan suatu keinginan, kebutuhan, keharusan ?
4. Apa sikap yang bapak / ibu (pemimpin) ambil dalam menjaga komitmen tersebut?
5. Faktor pendorong dan penghambat apa yang mempengaruhi komitmen penerapan SAP basis akrua?l ?
6. Bagaimana pendapat bapak/ibu (pemimpin) mengenai kualitas pegawai yang berkaitan langsung dengan penerapan SAP basis Akrua?l khususnya pegawai subbag keuangan ?
7. Apakah kuantitas pegawai sudah mencukupi dalam penerapan SAP basis akrua?l?
8. Apakah susunan umur mempengaruhi penerapan SAP basis akrua?l (dalam bidang SI)?
9. Apakah latar pendidikan pegawai mempengaruhi penerapan SAP basis Akrua?l?
10. Apakah tingkat pendidikan pegawai mempengaruhi penerapan SAP basis Akrua?l?
11. Bagaimana tingkat produktivitas pegawai dalam menerapkan SAP basis Akrua?l?
12. Apa faktor pendorong dan penghambat yang meningkatkan produktivitas pegawai dalam menerapkan SAP basis Akrua?l?

13. Bagaimana tingkat kedisiplinan pegawai dalam menerapkan SAP basis Akual?
14. Bagaimana konsistensi pegawai dalam menerapkan SAP basis Akual?
15. Apakah sarana dan prasarana (perangkat keras) yang ada sudah mencukupi dalam menerapkan SAP basis Akual?
16. Apakah jaringan komunikasi (internet) sudah mencukupi dalam menerapkan SAP basis Akual?

Cimahi, ... 10 Juli 2017

Menyetujui,
Narasumber



NP. 196203201992032003.


uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
“EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL DI DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT”

Oleh : Putri Wulandari (Administrasi Publik – UIN SGD Bandung)

Narasumber	RUCHIAT
Jabatan	PELAKSANA KEUANGAN
Tempat	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Tanggal	19 Juni / 2017
Waktu	09.00 - WIB

Daftar Pertanyaan :

1. Menurut pendapat bapak / ibu apakah komitmen penerapan SAP basis AkruaI merupakan suatu keinginan, kebutuhan, keharusan ?
2. Apa sikap yang bapak / ibu ambil dalam menjaga komitmen tersebut?
3. Faktor pendorong dan penghambat apa yang mempengaruhi komitmen penerapan SAP basis akrual ?
4. Apa saja pelatihan dan sosialisasi SAP basis AkruaI sebelum penerapan dan apakah sudah mencukupi bagi para pegawai ?
5. Apakah setelah penerapan masih terdapat pelatihan dan sosialisasi ?
6. Pelatihan dan sosialisasi seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan para pegawai?
7. Sistem teknologi informasi apa yang digunakan dalam penerapan SAP basis AkruaI ?
8. Bagaimana kualitas sistem dan kualitas informasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) untuk Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran ?
9. Bagaimana kualitas sistem dan kualitas informasi aplikasi ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah)?
10. Faktor pendorong dan penghambat apa saja dalam penerapan sistem informasi SAP basis akrual ini ?
11. Adakah pengaruh penerapan SAP basis AkruaI kepada kualitas pelayanan oleh DINSOS Jabar ?
12. Bagaimana pengaruh penerapan SAP basis AkruaI kepada kualitas laporan keuangan oleh DINSOS Jabar ?

13. Bagaimana pengaruh penerapan SAP basis AkruaI kepada pengelolaan keuangan oleh DINSOS Jabar ?
14. Bagaimana minat pegawai dalam menerapkan SAP basis akruaI?
15. Bagaimana minat pegawai dalam memakai dan menggunakan sistem informasi yang berkaitan dengan SAP basis akruaI?
16. Apakah pemakaian sistem informasi yang berkaitan dengan SAP basis akruaI sudah maksimal?
17. Apa kelebihan dan kekurangan dari sistem informasi untuk SAP basis akruaI?
18. Perubahan apa yang dirasakan pegawai pengelola keuangan setelah menerapkan SAP basis akruaI?
19. Dampak apa yang ditimbulkan dari penerapan SAP basis akruaI dalam organisasi?

Cimahi, 19 Juni 2017

Menyetujui,
Narasumber



uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
“EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL DI DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT”

Oleh : Putri Wulandari (Administrasi Publik – UIN SGD Bandung)

Narasumber	<i>Taufiq Hidayat</i>
Jabatan	<i>Kelompok / Munkin OPD</i>
Tempat	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Tanggal	10 Juli / 2017
Waktu	09.00 - 09.30 WIB

Daftar Pertanyaan :

1. Menurut pendapat bapak / ibu apakah komitmen penerapan SAP basis AkruaI merupakan suatu keinginan, kebutuhan, keharusan ?
2. Apa sikap yang bapak / ibu ambil dalam menjaga komitmen tersebut?
3. Faktor pendorong dan penghambat apa yang mempengaruhi komitmen penerapan SAP basis akruaI ?
4. Apa saja pelatihan dan sosialisasi SAP basis AkruaI sebelum penerapan dan apakah sudah mencukupi bagi para pegawai ?
5. Apakah setelah penerapan masih terdapat pelatihan dan sosialisasi ?
6. Pelatihan dan sosialisasi seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan para pegawai?
7. Sistem teknologi informasi apa yang digunakan dalam penerapan SAP basis AkruaI ?
8. Bagaimana kualitas sistem dan kualitas informasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) untuk Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran ?
9. Bagaimana kualitas sistem dan kualitas informasi aplikasi ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah)?
10. Faktor pendorong dan penghambat apa saja dalam penerapan sistem informasi SAP basis akruaI ini ?
11. Adakah pengaruh penerapan SAP basis AkruaI kepada kualitas pelayanan oleh DINSOS Jabar ?
12. Bagaimana pengaruh penerapan SAP basis AkruaI kepada kualitas laporan keuangan oleh DINSOS Jabar ?

13. Bagaimana pengaruh penerapan SAP basis AkruaI kepada pengelolaan keuangan oleh DINSOS Jabar ?
14. Bagaimana minat pegawai dalam menerapkan SAP basis akruaI?
15. Bagaimana minat pegawai dalam memakai dan menggunakan sistem informasi yang berkaitan dengan SAP basis akruaI?
16. Apakah pemakaian sistem informasi yang berkaitan dengan SAP basis akruaI sudah maksimal?
17. Apa kelebihan dan kekurangan dari sistem informasi untuk SAP basis akruaI?
18. Perubahan apa yang dirasakan pegawai pengelola keuangan setelah menerapkan SAP basis akruaI?
19. Dampak apa yang ditimbulkan dari penerapan SAP basis akruaI dalam organisasi?

Cimahi, 10 Juli 2017

Mengetahui,
Narasumber



NIP. 196709042007011004

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
“EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL DI DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT”

Oleh : Putri Wulandari (Administrasi Publik – UIN SGD Bandung)

Narasumber	Tintin Sumartini
Jabatan	BENDAHARA
Tempat	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Tanggal	19 JUNI / 2017
Waktu	08.00 - 08.30 WIB

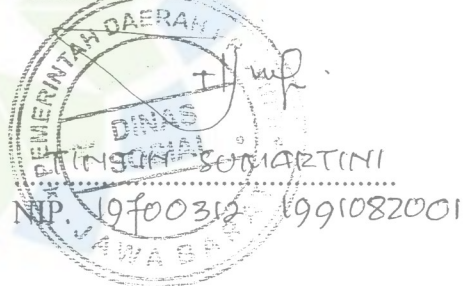
Daftar Pertanyaan :

1. Menurut pendapat bapak / ibu apakah komitmen penerapan SAP basis AkruaI merupakan suatu keinginan, kebutuhan, keharusan ?
2. Apa sikap yang bapak / ibu ambil dalam menjaga komitmen tersebut?
3. Faktor pendorong dan penghambat apa yang mempengaruhi komitmen penerapan SAP basis akrual ?
4. Apa saja pelatihan dan sosialisasi SAP basis AkruaI sebelum penerapan dan apakah sudah mencukupi bagi para pegawai ?
5. Apakah setelah penerapan masih terdapat pelatihan dan sosialisasi ?
6. Pelatihan dan sosialisasi seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan para pegawai?
7. Sistem teknologi informasi apa yang digunakan dalam penerapan SAP basis AkruaI ?
8. Bagaimana kualitas sistem dan kualitas informasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) untuk Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran ?
9. Bagaimana kualitas sistem dan kualitas informasi aplikasi ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah)?
10. Faktor pendorong dan penghambat apa saja dalam penerapan sistem informasi SAP basis akrual ini ?
11. Adakah pengaruh penerapan SAP basis AkruaI kepada kualitas pelayanan oleh DINSOS Jabar ?
12. Bagaimana pengaruh penerapan SAP basis AkruaI kepada kualitas laporan keuangan oleh DINSOS Jabar ?

13. Bagaimana pengaruh penerapan SAP basis AkruaI kepada pengelolaan keuangan oleh DINSOS Jabar ?
14. Bagaimana minat pegawai dalam menerapkan SAP basis akruaI?
15. Bagaimana minat pegawai dalam memakai dan menggunakan sistem informasi yang berkaitan dengan SAP basis akruaI?
16. Apakah pemakaian sistem informasi yang berkaitan dengan SAP basis akruaI sudah maksimal?
17. Apa kelebihan dan kekurangan dari sistem informasi untuk SAP basis akruaI?
18. Perubahan apa yang dirasakan pegawai pengelola keuangan setelah menerapkan SAP basis akruaI?
19. Dampak apa yang ditimbulkan dari penerapan SAP basis akruaI dalam organisasi?

Cimahi, 19 JUNI2017

Menyetujui,
Narasumber



uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
“EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL DI DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT”

Oleh : Putri Wulandari (Administrasi Publik – UIN SGD Bandung)

Narasumber	Yudi Yudiantara
Jabatan	Verifikatur
Tempat	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Tanggal	10 Juli / 2017
Waktu	10.40 - 11.10 WIB

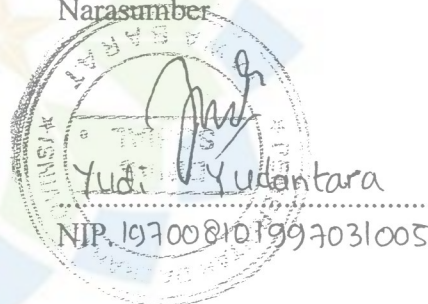
Daftar Pertanyaan :

1. Menurut pendapat bapak / ibu apakah komitmen penerapan SAP basis AkruaI merupakan suatu keinginan, kebutuhan, keharusan ?
2. Apa sikap yang bapak / ibu ambil dalam menjaga komitmen tersebut?
3. Faktor pendorong dan penghambat apa yang mempengaruhi komitmen penerapan SAP basis akrual ?
4. Apa saja pelatihan dan sosialisasi SAP basis AkruaI sebelum penerapan dan apakah sudah mencukupi bagi para pegawai ?
5. Apakah setelah penerapan masih terdapat pelatihan dan sosialisasi ?
6. Pelatihan dan sosialisasi seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan para pegawai?
7. Sistem teknologi informasi apa yang digunakan dalam penerapan SAP basis AkruaI ?
8. Bagaimana kualitas sistem dan kualitas informasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) untuk Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran ?
9. Bagaimana kualitas sistem dan kualitas informasi aplikasi ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah)?
10. Faktor pendorong dan penghambat apa saja dalam penerapan sistem informasi SAP basis akrual ini ?
11. Adakah pengaruh penerapan SAP basis AkruaI kepada kualitas pelayanan oleh DINSOS Jabar ?
12. Bagaimana pengaruh penerapan SAP basis AkruaI kepada kualitas laporan keuangan oleh DINSOS Jabar ?

13. Bagaimana pengaruh penerapan SAP basis AkruaI kepada pengelolaan keuangan oleh DINSOS Jabar ?
14. Bagaimana minat pegawai dalam menerapkan SAP basis akrual?
15. Bagaimana minat pegawai dalam memakai dan menggunakan sistem informasi yang berkaitan dengan SAP basis akrual?
16. Apakah pemakaian sistem informasi yang berkaitan dengan SAP basis akrual sudah maksimal?
17. Apa kelebihan dan kekurangan dari sistem informasi untuk SAP basis akrual?
18. Perubahan apa yang dirasakan pegawai pengelola keuangan setelah menerapkan SAP basis akrual?
19. Dampak apa yang ditimbulkan dari penerapan SAP basis akrual dalam organisasi?

Cimahi, 10 Juli2017

Menyetujui,
Narasumber



uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
“EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL DI DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT”

Oleh : Putri Wulandari (Administrasi Publik – UIN SGD Bandung)

Narasumber	Yudi Yudiantara
Jabatan	Verifikatur
Tempat	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Tanggal	10 Juli 2017
Waktu	10.40 – 11.10 WIB

Daftar Pertanyaan :

1. Keharusan
2. Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi masing masing
3. Ketaatan atau kedisiplinan dalam mematuhi peraturan
4. SAP berbasis akrual
5. Ada
6. Pelatihan dan sosialisasi sebagai dasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
7. SIPKD
8. Kualitas sudah baik
9. Sudah baik
10. Pengetahuan sumber daya manusia yang melaksanakan SIPKD
11. Ada
12. Memperlancar laporan ke pusat
13. Cukup berpengaruh

14. Cukup diminati karena harus dilaksanakan
15. Cukup diminati
16. Sudah
17. Kelebihannya karena sistem aplikasi online, kekurangannya adalah error atau loading pada saat menggunakan aplikasi
18. Tidak membutuhkan lagi buku sebagai sara menulis
19. Lebih memudahkan pengguna aplikasi dari pada manual



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
“EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL DI DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT”

Oleh : Putri Wulandari (Administrasi Publik – UIN SGD Bandung)

Narasumber	Tintin Sumartini
Jabatan	Bendahara
Tempat	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Tanggal	19 Juni 2017
Waktu	08.00 – 08.30 WIB

Daftar Pertanyaan :

1. Keharusan
2. Melaksanakannya
3. Sumber daya manusia
4. Belum mencukupi
5. Masih ada
6. Lebih kepada bimbingan teknis
7. Aplikasi SIPKD dan ATISBADA
8. Kualitas sistem dan kualitas informasi SIPKD sudah baik
9. Kualitas sistem dan kualitas informasi ATISISBADA sudah baik
10. Belum tercapainya kesesuaian antara SAP dengan SIPKD
11. Ada pengaruhnya
12. Lebih membantu kepada kualitas kinerja OPD
13. Lebih tertata dalam pengelolaan keuangan
14. Cukup berminat

15. Belum maksimal

16. Belum maksimal

17. Memudahkan pengelolaan keuangan dengan sistem aplikasi

18. Lebih tertata dalam penatausahaan keuangan

19. Pekerjaan lebih efektif



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
“EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL DI DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT”

Oleh : Putri Wulandari (Administrasi Publik – UIN SGD Bandung)

Narasumber	Taufiq Hidayat
Jabatan	Pelaporan
Tempat	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Tanggal	10 Juli 2017
Waktu	09.00 – 09.30

Daftar Pertanyaan :

1. Keharusan
2. Melaksanakannya dengan baik
3. Sumber daya manusia
4. Pelatihan akuntansi akrual, aplikasi SIPKD. Tetapi masih belum mencukupi
5. Masih
6. Pelatihan dan sosialisasi akuntansi berbasis akrual
7. SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)
8. Cukup baik
9. Cukup baik
10. Lebih ke sumber daya manusianya
11. Ada pengaruh
12. Laporan keuangan menjadi lebih baik
13. Pengelolaan keuangan menjadi meningkat kualitasnya
14. Semangat

15.Semangat dan tertarik

16.Belum maksimal

17.Kelebihannya pengeluaran atau nilai menjadi lebih riil, lebih up to date.

Kekurangannya sumber daya manusia belum bisa menggunakan akrual

18.Lebih banyak inputan atau pekerjaan

19.Laporan lebih realistis



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
“EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL DI DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT”

Oleh : Putri Wulandari (Administrasi Publik – UIN SGD Bandung)

Narasumber	Dra. Hj. Haye Nurhayati, MM
Jabatan	Kepala Sub Bagian Keuangan
Tempat	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Tanggal	10 Juli 2017
Waktu	13.30 – 14.00 WIB

Daftar Pertanyaan :

1. Dua faktor terkait dengan strategi utama penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) basis Akrua
 - Peningkatan sumber daya manusia itu sendiri, karena para pegawai harus mengerti dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) basis Akrua dan apa-apa saja yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) basis Akrua itu sendiri.
 - Peningkatan sumber pendukung. Karena Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) basis Akrua tidak dapat diterapkan jika sarana pendukung belum lengkap misalnya kekurangan perangkat keras seperti laptop, ketersediaan jaringan, dan dalam hal lain misalnya seperti pelatihan atau bimbingan teknis.
2. Adaptasi dari basis kas ke basis akrua yang cukup sulit, latar belakang sumber daya manusia atau pegawai yang tidak semua berlatar belakang pendidikan atau jurusan akuntansi, dan belum semua pegawai mengerti tentang akuntansi akrua.
3. Kebutuhan (*Continuance Commitment*) dan keharusan (*Normative Commitment*) karena memudahkan untuk mengelola aset dan menghitung kewajiban.

4. Sikapnya menjaga komitmen dengan menganjurkan pengelola keuangan dan pengelola barang untuk mengikuti BIMTEK (Bimbingan Teknis) akuntansi berbasis akrual.
5. Tidak ada hambatan
6. kualitas pegawai sub bagian keuangan harus ditingkatkan melalui pelatihan baik manual maupun teoritis.
7. Untuk kuantitas pegawai sendiri sudah mencukupi.
8. Susunan umur pegawai tidak terlalu mempengaruhi kepada penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) basis Akrual,
9. Latar belakang sangat mempengaruhi kepada pengetahuan dan keahlian pegawai terkait dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
10. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kepada pengetahuan dan keahlian pegawai terkait dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
11. Tingkat produktivitas para pegawai sudah produktif dan baik karena semua pekerjaan terselesaikan dengan baik.
12. Adanya pendampingan dalam setda BPKAD
13. Sudah cukup disiplin
14. Tingkat loyalitas para pegawai ditunjukkan dengan konsistensi dalam pekerjaan yang cukup baik.
15. Sudah mencukupi dan menunjang
16. Sudah mencukupi

HASIL WAWANCARA PENELITIAN
“EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL DI DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT”

Oleh : Putri Wulandari (Administrasi Publik – UIN SGD Bandung)

Narasumber	Dra. Hj. Lilis Sulastri, MM
Jabatan	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Tempat	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Tanggal	19 Juni 2017
Waktu	07.43 – 08.05 WIB

Daftar Pertanyaan :

1. Hanya beberapa, karena yang latar akuntansi dan ekonomi hanya 3 orang.
2. Susunan umur cukup berpengaruh, karena bagi pegawai yang sudah senior seringkali dilanda rasa bosan dan lainnya.
3. Jika dilihat dari sisi latar belakang pendidikan, pada sub bagian keuangan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan sebagai sarjana ekonomi hanya 3 orang saja, namun bukan berarti pegawai lain tidak kompeten, karena pegawai lain tersebut telah melakukan diklat. Diklat dilakukan di balai diklat yang kini berganti nama menjadi BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia), diklat tersebut dilakukan sesuai permintaan BPSDM. Jadi meskipun pegawai bagian keuangan banyak yang berlatar belakang bukan pendidikan ekonomi, tetapi sudah mumpuni karena telah melaksanakan diklat. Jika melihat secara rinci mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) basis Akrual memang belum semua pegawai di sub bagian keuangan mengerti tentang basis Akrual ini, maka dari itu kepala sub bagian keuangan

menugaskan orang pilihan yang mengerti dan memahami tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) basis Akrual ini.

4. Cukup mempengaruhi
5. Sarana dan prasarana fisik sudah mencukupi, contohnya seperti tahun kemarin ada permohonan kepada pusat mengenai kekurangan laptop dan komputer dan sudah terpenuhi. Sekarang rata rata satu orang pegawai sudah memiliki satu sarana tersebut. Apalagi untuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) basis Akrual dituntut dari BPKAD memang harus memenuhi persyaratan agar pekerjaan terpenuhi, dan dari sub bagian keuangan juga dituntut lebih cepat lagi dalam penyelesaian permasalahan keuangan.
6. Jaringan internet di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sudah mencukupi, dan tahun ini bahkan ada penambahan bandwitch. Jika terjadi masalah sudah ada tim IT dan sudah ada pemeliharaan untuk jaringan internet di kepegawaian umum setiap bulan. Tim IT terdiri dari 7 orang yang ditempatkan per bidang, dan 4 orang khusus membantu di bidang sekretariat keuangan, kepegawaian, perencanaan dan program, agar ketika menemui masalah dapat lebih cepat lagi ditangani.
7. Sosialisasi sebelum penerapan sudah ada yakni dilaksanakan oleh biro keuangan dan BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia). Sebelum penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) basis Akrual biro keuangan lebih tanggap karena termasuk dalam salah satu program biro keuangan sebelum kemudian diprogramkan di OPD-OPD yang difasilitasi oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan BPSDM (Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia). Pegawai yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan ini lebih diutamakan pegawai sub bagian keuangan, baru kemudian bagi pegawai-pegawai di bidang dan di balai-balai.

8. Masih dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan. Biro keuangan sebagai pihak yang memfasilitasi anggaran untuk sosialisasi, tapi kadang bagi peserta yang di luar daerah hanya difasilitasi dari transportnya saja. Sosialisasi dan pelatihan sudah baik dan memenuhi persyaratan karena dipantau oleh biro keuangan dan BPKAD (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia).
9. Melihat kebutuhan dan perkembangan zaman beliau menganggap ada yang perlu di tingkatkan lagi, namun sebagai OPD hanya mengikuti kebutuhan biro keuangan dan BPDSDM saja, apalagi dengan melihat fakta bahwa jawa barat mendapat WTP dalam opini BPK, pasti ada yang harus di tingkatkan lagi,tapi sebagai OPD tetap mengikuti bagaimana kebijakan pelaksana program yakni BPKAD yang difasilitasi oleh BPSDM dan BKD.

HASIL WAWANCARA PENELITIAN
“EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL DI DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT”

Oleh : Putri Wulandari (Administrasi Publik – UIN SGD Bandung)

Narasumber	DR. Hj. Ida Wahida Hidayati, S.E., S.H., M.Si
Jabatan	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Tempat	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Tanggal	11 Juli 2017
Waktu	10.46 WIB - selesai

Daftar Pertanyaan :

1. Strateginya yaitu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena SAP merupakan sebuah standar dioperasikan oleh para pegawai. Jadi, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) basis akrual akan berhasil bergantung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.
2. Faktor yang menghambat strategi penerapannya tidak semua pelaksana di sekretariat paham SAP basis akrual, jadi berpengaruh pada pelaksanaan tugas di sekretariat.
3. Komitmen lebih merujuk kepada sebuah kebutuhan atau *Continuance Commitment*.
4. Sikap yang diambil adalah mendukung para pengelola keuangan, khususnya pengelola Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) basis Akrual.
5. Tidak ada penghambat
6. Kualitas pegawai yang berkaitan langsung dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) basis Akrual harus ditingkatkan lagi kemampuannya
7. Kuantitas pegawai di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sendiri sudah mencukupi

HASIL WAWANCARA PENELITIAN
“EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL DI DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT”

Oleh : Putri Wulandari (Administrasi Publik – UIN SGD Bandung)

Narasumber	Ruchiat
Jabatan	Pelaksana Keuangan
Tempat	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Tanggal	19 Juni 2017
Waktu	09.00 WIB - selesai

Daftar Pertanyaan :

1. Keharusan karena sudah di atur dalam perda
2. Melaksanakan peraturan tersebut
3. Faktor pendorong dan penghambat paling mempengaruhi itu sumber daya manusia
4. Pelatihan dan sosialisasi SAP basis Akrua, belum mencukupi
5. Masih
6. Lebih kepada bimbingan teknis
7. Aplikasi SIPKD dan ATISISBADA
8. Sangat menunjang dalam kinerja OPD
9. Sudah sangat baik
10. Penghambatnya masih belum sinkron dengan SIPKD
11. Lebih efektif dan efisien
12. Menjadi lebih baik
13. Lebih terinventarisir dalam pengelolaan keuangan

14. Sangat berminat

15. Sangat antusias

16. Belum, masih adaptasi

17. Lebih memudahkan dalam pengelolaan keuangan

18. Lebih tertata dalam penatausahaan keuangan

19. Kepada efektivitas kinerja sumber daya manusia



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

“EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL DI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT”

Kajian	Aspek Kajian	Parameter	Pertanyaan	Informan
Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual	1. Komitmen (Meyer dan Allen 1991)	1. <i>Affective commitment</i>	- Strategi apa saja yang bapak / ibu (pemimpin) lakukan dalam upaya penerapan SAP basis Akrual ? - Faktor apa saja yang mempengaruhi strategi-strategi yang bapak/ibu ambil? - Menurut pendapat bapak / ibu apakah komitmen penerapan SAP basis Akrual merupakan suatu keinginan ? - Apa sikap yang bapak / ibu ambil dalam menjaga komitmen tersebut?	- Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat - Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum - Kepala Subbagian Keuangan - Kepala Subbagian Perencanaan dan Program - Staff / pegawai subbagian keuangan
		2. <i>Continuance commitment</i>	- Menurut pendapat bapak / ibu apakah komitmen penerapan SAP basis Akrual merupakan suatu kebutuhan ? - Apa sikap yang bapak / ibu ambil dalam menjaga komitmen tersebut?	
		3. <i>Normative commitment</i>	- Menurut pendapat bapak / ibu apakah komitmen penerapan SAP basis Akrual merupakan suatu keharusan ? - Apa sikap yang bapak / ibu ambil dalam menjaga komitmen tersebut? - Faktor pendorong apa saja yang membuat para karyawan memegang komitmen dengan baik dalam menerapkan SAP basis Akrual? - Faktor penghambat apa yang menyebabkan komitmen penerapan SAP basis akrual tidak berjalan baik ?	
	2. Sumber	1. Kualitas dan	1. Bagaimana pendapat bapak/ibu (pemimpin) mengenai kualitas	

Daya Manusia (Malayu P. Hasibuan)	kuantitas SDM yang tersedia	pegawai yang berkaitan langsung dengan penerapan SAP basis AkruaI khususnya pegawai subbag keuangan ? 2. Apakah kuantitas pegawai sudah mencukupi dalam penerapan SAP basis akruaI?
	2. Susunan umur dan tingkat pendidikan SDM yang ada	1. Apakah susunan umur mempengaruhi penerapan SAP basis akruaI (dalam bidang SI)? 2. Apakah latar pendidikan pegawai mempengaruhi penerapan SAP basis AkruaI? 3. Apakah tingkat pendidikan pegawai mempengaruhi penerapan SAP basis AkruaI?
	3. Tingkat produktivitas SDM yang ada	1. Bagaimana tingkat produktivitas pegawai dalam menerapkan SAP basis AkruaI? 2. Apa faktor pendorong yang meningkatkan produktivitas pegawai dalam menerapkan SAP basis AkruaI? 3. Apa faktor penghambat dalam meningkatkan produktivitas pegawai dalam menerapkan SAP basis AkruaI?
	4. Disiplin dan loyaltias SDM	1. Bagaimana tingkat kedisiplinan pegawai dalam menerapkan SAP basis AkruaI? 2. Bagaimana konsistensi pegawai dalam menerapkan SAP basis AkruaI?
	3. Infrastruktur	1. Apakah sarana dan prasarana (perangkat keras) yang ada sudah mencukupi dalam menerapkan SAP basis AkruaI?
	1. Infrastruktur keras (Physical Infrastructure)	
	2. Infrastruktur	1. Apakah jaringan komunikasi (internet) sudah mencukupi dalam

		kera non-fisik (<i>Non-Physical Infrastructure</i>)	menerapkan SAP basis Akual?
		3. Infrastruktur lunak (<i>Soft Infrastructure</i>)	1. Apa saja pelatihan dan sosialisasi SAP basis Akual sebelum penerapan dan apakah sudah mencakupi bagi para pegawai ? 2. Apakah setelah penerapan masih terdapat pelatihan dan sosialisasi ? 3. Pelatihan dan sosialisasi seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan para pegawai ?
4. Sistem Informasi (DeLone & McLean 2003)		1. Kualitas sistem	1. Sistem teknologi informasi apa yang digunakan dalam penerapan SAP basis Akual ? 2. Bagaimana kualitas sistem SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) untuk Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran ? 3. Bagaimana kualitas sistem aplikasi ATISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah)? 4. Faktor pendorong apa yang membuat sistem informasi SAP basis akual ini mudah dijalankan? 5. Apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan dalam penggunaan sistem tersebut ?
		2. Kualitas informasi	1. Bagaimana kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) untuk Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran ? 2. Bagaimana kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem aplikasi ATISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah)?
		3. Kualitas	1. Adakah pengaruh penerapan SAP basis Akual kepada kualitas

			pelayanan oleh DINSOS Jabar ? 2. Bagaimana pengaruh penerapan SAP basis AkruaI kepada kualitas laporan keuangan oleh DINSOS Jabar ? 3. Bagaimana pengaruh penerapan SAP basis AkruaI kepada pengelolaan keuangan oleh DINSOS Jabar ?
		4. Minat memakai dan pemakaian	1. Bagaimana minat pegawai dalam menerapkan SAP basis akruaI? 2. Bagaimana minat pegawai dalam memakai dan menggunakan sistem informasi yang berkaitan dengan SAP basis akruaI? 3. Apakah pemakaian sistem informasi yang berkaitan dengan SAP basis akruaI sudah maksimal? 4. Apa hambatan yang dirasakan dalam pemakaian sistem informasi SAP basis akruaI?
		5. Kepuasan pemakai	1. Apa kelebihan dari sistem informasi untuk SAP basis akruaI? 2. Apa kekurangan dari sistem informasi untuk SAP basis akruaI?
		6. Dampak individual dan organisasional	1. Perubahan apa yang dirasakan pegawai pengelola keuangan setelah menerapkan SAP basis akruaI? 2. Dampak apa yang ditimbulkan dari penerapan SAP basis akruaI dalam organisasi, khususnya berkaitan dengan pelaporan keuangan?

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
“EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL DI DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT”

Oleh : Putri Wulandari (Administrasi Publik – UIN SGD Bandung)

Narasumber	Taufiq Hidayat
Jabatan	Bidang Pelaporan
Tempat	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Tanggal	14 September 2017

Daftar Pertanyaan :

A. DANA

1. Dari mana asal sumber dana yang dipergunakan untuk merealisasikan penerapan SAP basis AkruaI ini ?
2. Apakah dinas sosial menggunakan sumber dana lain selain sumber dana tersebut diatas ?
3. Apakah dana yang ada sudah maksimal penggunaannya untuk penerapan SAP basis akruaI ?
4. Bagaimana upaya dinas sosial dalam pengaturan dana tersebut agar berguna secara maksimal menerapkan SAP basis akruaI ?

B. PERUBAHAN

1. Bagaimana reaksi pegawai terhadap munculnya peraturan yang mewajibkan penerapan SAP basis AkruaI?
2. Adakah pegawai yang bereaksi menentang atas aturan dan basis baru AkruaI ini ?
3. Pada tahap sosialisasi adakah minat partisipasi dari pegawai untuk mengetahui tentang basis akruaI ini ?
4. Pada tahap implementasi adakah perubahan sikap pegawai seperti mengkritik, atau tidak tertarik dalam menerapkan basis baru ini ?
5. Bagaimana sikap yang diambil oleh para pegawai atas perubahan basis kas menjadi basis akruaI ?